

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 2007.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Gaffar, Janedri M. *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: MKRI, 2009.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mulyadi, Kartini. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan dan PKPU*. Bandung: Alumni, 2013.

Shubhan, M. Hadi. *Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia Dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor*, Pidato pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Kepailitan. Surabaya: FH Universitas Airlangga, 2022.

Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Jakarta: Kencana, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Edisi 2*. Jakarta: Sofmedia, 2010.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348

JURNAL

Ihsan Muhammad, Tuti Widyaningrum. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU. *Jurnal Ius Constituendum*, 8 (2), 338-339

Muladi, Mohammad Agus. (2018). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24 (4), 535-57

Sari, Eva Puspita. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1 (6), 9-10

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015